



KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2020

LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE BOGOR CITY 2011-2020

¹ Rea Dwiardhya Garini, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

² Dr. Ir. Faizal Maad, M.Si, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

³ Dr. Ir. James Sinurat, MURP, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

Informasi Naskah

Submitted: 12 Juli 2023

Revision: 16 Oktober 2023

Accepted: 18 Desember 2023

Abstract

This study aims to determine the Regional Financial Performance of the Bogor City Government in 2011-2020 in terms of financial ratios and factors that influence Regional Financial Performance. This research is a type of quantitative descriptive research. The data in this study is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics for the City of Bogor. The data analysis method used is ratio analysis and descriptive analysis, multiple linear regression analysis, classical assumption test and hypothesis testing. The results of the analysis of financial performance, in terms of ratios: (1) Regional Financial Independence Ratio (RKKD) in the Moderate category, and Participatory relationship patterns. (2) Regional Financial Dependence Ratio (RTKKD) with Very High category. (3) The ratio of the Level of Decentralization of Regional Fiscal Finance (RTDDFKD) in the Adequate category. (4) Ratio of Effectiveness to PAD (REPAD) with Very Effective criteria. (5) Regional Financial Efficiency Ratio (REKD) with Inefficient criteria. The results of the analysis are reviewed from the factors that influence regional financial performance. The PAD variable partially has a significant positive effect on the Regional Financial Performance of the Bogor City Government. The Balancing Fund partially has a significant negative effect on the Regional Financial Performance of the Bogor City Government.

Kata Kunci:

Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, APBD.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020 ditinjau dari rasio keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rasio dan analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis. Hasil analisis kinerja keuangan, ditinjau dari rasio: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dalam kategori Sedang, dan pola hubungan Partisipatif. (2) Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (RTKKD) dengan kategori Sangat Tinggi. (3) Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah (RTDDFKD) dengan kategori Cukup. (4) Rasio Efektivitas terhadap PAD (REPAD) dengan kriteria Sangat Efektif. (5) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dengan kriteria Tidak Efisien. Hasil analisis ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Variabel PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor. Variabel PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor. Hasil penelitian ini membawa implikasi bagi Pemerintah Kota Bogor guna melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada.

Keywords:

Regional Financial Performance, Financial Ratios, APBD

* Corresponding Author.

Rea Dwiardhya, e-mail: ardhiyadi11@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan otonomi daerah merupakan fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan yang sangat dibutuhkan didalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Berlandaskan kepada kedua Undang-Undang ini, otonomi daerah memberikan hak wewenang, dan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat serta menggali dan mengelola sumber daya keuangan yang bersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan mengurangi ketergantungan keuangan Pemerintahan Daerah terhadap Pemerintahan Pusat melalui dana perimbangan.

Kinerja keuangan suatu daerah dapat diketahui dengan cara melakukan analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu daerah agar dapat diketahui apakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik atau tidak. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penerapan analisis rasio keuangan terhadap APBD merupakan cara menganalisis dalam mengelola keuangan daerah, agar dapat diketahui dengan cara melakukan pengkajian/analisis terhadap keuangan suatu daerah.

Kota Bogor merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak dekat dengan Ibu Kota Negara, Jakarta, yang memiliki potensi cukup besar, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun asset dan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakatnya demikian pula penciptaan transparansi dan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Dari hasil studi pendahuluan yang diperoleh data mengenai pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2011-2020 sebagai mana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Gambaran APBD Kota Bogor Tahun 2011-2020 (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Keterangan					
	Pendapatan		Dana	Lain-lain	Belanja	Surplus/
	Daerah	PAD	Perimbangan	Pendapatan Daerah yang Sah	Daerah	(Defisit)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
2011	1,141.64	230.45	860.21	50.98	1,074.58	67.06
2012	1,375.30	300.93	1,014.91	59.46	1,111.78	263.52
2013	1,574.37	464.69	1,082.27	27.41	1,421.28	153.09
2014	1,757.86	544.99	1,188.40	24.47	1,702.11	55.75
2015	1,827.01	617.06	840.33	369.62	2,038.55	-211.54
2016	2,135.47	711.73	1,146.50	277.24	2,512.41	-376.94
2017	2,081.12	728.66	1,148.23	204.23	2,391.24	-310.12
2018	2,261.05	875.23	1,083.55	302.27	2,530.75	-269.70
2019	2,350.48	944.40	1,039.37	366.71	2,607.68	-257.20
2020	2,434.34	1,083.41	1,054.62	296.31	2,604.49	-170.15

Sumber: Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Sebagai gambaran awal mengenai APBD, pada Tabel 1 disajikan data mengenai realisasi perhitungan APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011 – 2020 telah ditemukan beberapa permasalahan: a) Pendapatan Daerah (merupakan akumulasi terdiri dari Pos Penerimaan PAD, Pos Penerimaan Dana Perimbangan serta Pos Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) dari tahun 2011 hingga tahun 2016 terjadi kenaikan yang sangat signifikan, meskipun pada tahun 2017 terjadi penurunan namun selanjutnya untuk tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. b) PAD dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 masih jauh di bawah Dana Perimbangan, namun pada tahun 2020 PAD melebihi Dana Perimbangan sebesar Rp 28,79 miliar atau sebesar 2,657%. c) Dana Perimbangan dari tahun 2011 hingga tahun 2019 lebih besar dari PAD dan terjadi kenaikan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 di bawah PAD d) Belanja Daerah dari tahun 2011 sampai tahun 2014 masih di bawah Pendapatan Daerah. Namun untuk realisasi Belanja Daerah tahun 2015 sampai tahun 2020 melebihi Pendapatan Daerah. e) Surplus/Defisit Anggaran (Selisih Pendapatan Daerah dikurangi Belanja Daerah) untuk realisasi tahun 2011 sampai tahun 2014 terjadi Surplus Anggaran. Namun untuk realisasi tahun 2015 sampai 2020 terjadi Defisit Anggaran yang artinya Total Belanja Daerah melebihi Total Pendapatan Daerah.

Penerimaan PAD tahun 2020 melebihi Dana Perimbangan diduga akibat dari Pandemi Covid 19 yang berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian global, sehingga untuk Realisasi Dana Perimbangan di tahun 2020 terjadi pengurangan anggaran APBN di sektor pos penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak untuk tahun 2019 sebesar Rp 96,95 miliar menjadi sebesar Rp 81,40 miliar di tahun 2020 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 15,55 miliar atau sebesar 16,04%. Juga terjadi pengurangan anggaran di sektor pos Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2019 sebesar Rp 128,63 miliar menjadi sebesar Rp 122,39 miliar di tahun 2020 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 6,24 miliar atau sebesar 4,85%.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Pemerintah Kota Bogor antara lain : (1) masih rendahnya kemampuan daerah di dalam memanfaatkan seluruh potensi sektor ekonomi yang ada dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki serta kurangnya usaha dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan PAD yang relatif kecil dibandingkan Dana Perimbangan, (2) ketergantungan Pemerintah Daerah kepada subsidi Pemerintah Pusat yang tercermin dari besarnya bantuan Pemerintah Pusat dari sudut anggaran rutin yaitu melalui Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), yang bersumber dari pendapatan APBN, (3) masih tingginya jumlah Belanja Daerah dari pada Pendapatan Daerah, (4) inefisiensi Pemerintah Daerah dalam melakukan Belanja Daerah.

Kuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kota Bogor terdiri dari: 1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. 2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya Pemerintah Kota Bogor lebih berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya agar berbagai permasalahan yang telah dijelaskan di atas tadi berangsur-angsur dapat teratasi.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan dengan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan Pemerintah Daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kota Bogor, karena itu Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Kota Bogor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subyek sekaligus sebagai obyek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kota Bogor, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kota Bogor. Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD. Yang diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

a) Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di jajaran Pemerintahan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. Penelitian dilakukan dari bulan September hingga bulan Oktober 2021.

b) Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kuantitatif yaitu untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor dilihat dari rasio : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

c) Pengumpulan Data Penelitian

Data ini merupakan data sekunder, terdiri dari: data realisasi Pendapatan Daerah, data realisasi Pendapatan Asli Daerah, data realisasi Dana Perimbangan, data realisasi Belanja Daerah pada realisasi APBD T.A. 2011-2020. Data ini diperoleh dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan catatan-catatan keuangan yang ada pada instansi Pemerintah Kota Bogor yang diteliti selama Tahun 2011-2020.

d) Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berupa rasio, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

e) Teknik Analisis Data

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor digunakan 5 rasio keuangan terdiri dari: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), diukur menggunakan formulasi :

$$RKKD = \frac{PAD}{DP} \times 100 \%$$

Paul Harvey dalam Halim (2001: 261) mengemukakan mengenai pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. Pola hubungan instruktif, dimana peranan Pemerintahan Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Pedoman Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber : Halim (2007:232) Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta: Salemba Empat

Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (RTKKD), diukur menggunakan formulasi:

$$\text{RTKKD} = \frac{\text{DP}}{\text{Total PD}} \times 100 \%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Departemen Dalam Negeri – Fisipol UGM, 1991

Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah (RTDDFKD), diukur menggunakan formulasi :

$$\text{RTDDFKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total PD}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel 4 berikut :

Tabel 4. Kriteria Penilaian Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (%)	Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Departemen Dalam Negeri – Fisipol UGM, 1991

Rasio Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (REPAD), diukur menggunakan formulasi :

$$\text{REPAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

Kinerja keuangan berdasarkan nilai efektifitas yang diperoleh dari rumus diatas menurut Mohamad Mahsun (2006: 187) seperti pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Kriteria Penilaian Skala Interval Efektifitas terhadap PAD

Persentase (%)	Tingkat Efektifitas
Di atas 100%	Sangat Efektif

90% – 100%	Efektif
80% – 90%	Cukup Efektif
60% – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327, 1996

Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efektif apabila nilai persentasenya besar. Semakin besar rasio efektifitas berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), diukur menggunakan formulasi :

$$REKD = \frac{\text{Total Realisasi BD}}{\text{Total Realisasi PD}} \times 100\%$$

Tabel 6. Kriteria Penilaian Skala Interval Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase (%)	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
60% – 80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327, 1996

f) Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah digunakan metode analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan *software SPSS*. Sebelum dilakukan analisis regresi maka perlu Uji Asumsi Klasik, terdiri dari: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas.

g) Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel independen terdiri dari: Pendapatan Daerah (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Perimbangan (X3), dan Belanja Daerah (X4) sedangkan sebagai variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dimana persamaannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

h) Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, menggunakan analisis regresi linier berganda meliputi uji F, uji t, dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Keuangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator. Dengan menggunakan data yang di muat dalam laporan APBD Pemerintah Kota Bogor periode T. A. 2011-2020. Adapun kinerja keuangan daerah Kota Bogor berdasarkan hasil dari analisa rasio sebagaimana diuraikan berikut ini :

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Tabel 7. Hasil Olah Data RKKD Kota Bogor T.A. 2011 – 2020

T.A.	PAD (Rp)	DP (Rp)	RKKD (%)	Kemampuan Daerah	Pola Hubungan
2011	230.449.644.620	860.209.669.806	26,78	Rendah	Konsultatif
2012	300.932.470.210	1.014.910.114.083	29,65	Rendah	Konsultatif
2013	464.695.880.000	1.082.269.790.000	42,93	Rendah	Konsultatif
2014	544.996.250.000	1.188.391.600.000	45,85	Rendah	Konsultatif
2015	617.062.227.085	840.331.669.000	73,43	Sedang	Parsitipatif
2016	711.730.823.933	1.146.500.330.117	62,07	Sedang	Parsitipatif
2017	728.666.344.804	1.148.227.183.942	63,46	Sedang	Parsitipatif

2018	875.230.630.511	1.083.553.314.000	80,77	Tinggi	Delegatif
2019	944.394.650.807	1.039.371.277.000	90,86	Tinggi	Delegatif
2020	1.083.412.298.220	1.054.615.992.000	102,73	Tinggi	Delegatif
Rata - rata :			61,853	Sedang	Partisipatif

Sumber : Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana disajikan pada tabel 7, kemampuan keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2011 - 2014 berturut-turut adalah 26,78%, 29,65%, 42,93%, dan 45,85% yang termasuk dalam skala interval 25% - 50% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah tergolong Rendah sedangkan pola hubungan Konsultatif. Tahun Anggaran 2015 - 2017 berturut-turut adalah 73,43%, 62,07%, dan 63,46% yang termasuk dalam skala interval 50% - 75% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah tergolong Sedang dan pola hubungan Partisipatif. Tahun Anggaran 2018 - 2020 berturut-turut adalah 80,77%, 90,86%, dan 102,73% yang termasuk dalam skala interval 75% - 100% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah tergolong Sedang dan pola hubungan Delegatif.

Rata-rata persentase rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2011-2020 adalah 61,853% yang termasuk dalam skala interval 50% - 75% dengan kategori kemampuan keuangan daerah Sedang, dan pola hubungan rata-rata Partisipatif yaitu peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

b) Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (RTKKD)

Tabel 8. Hasil Olah Data RTKKD Kota Bogor Tahun 2011 - 2020

T.A.	DP (Rp)	PD (Rp)	Persentase (%)	RTKKD
2011	860.209.669.806	1.141.638.163.971	75,34	Sangat tinggi
2012	1.014.910.114.083	1.375.300.603.178	73,79	Sangat tinggi
2013	1.082.269.790.000	1.574.372.010.000	68,74	Sangat tinggi
2014	1.188.391.600.000	1.757.857.930.000	67,60	Sangat tinggi
2015	840.331.669.000	1.827.008.273.928	45,99	Tinggi
2016	1.146.500.330.117	2.135.473.505.109	53,68	Sangat tinggi
2017	1.148.227.183.942	2.081.123.963.826	55,17	Sangat tinggi
2018	1.083.553.314.000	2.261.049.903.659	47,92	Tinggi
2019	1.039.371.277.000	2.350.478.728.324	44,21	Tinggi
2020	1.054.615.992.000	2.434.344.617.189	43,32	Tinggi
Rata - rata :			57,576	Sangat tinggi

Sumber : Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana disajikan pada tabel 8, ketergantungan keuangan Pemerintah Kota Bogor tahun 2011-2014 adalah berturut-turut 75,34%, 73,79%, 68,74%, dan 67,60% yang termasuk dalam skala interval > 50,00% dikategorikan rasio ketergantungan keuangan daerah Sangat Tinggi. Tahun 2015 adalah 45,99% yang termasuk dalam skala interval 40,01%–50,00% dikategorikan rasio ketergantungan keuangan daerah Tinggi. Tahun 2016-2017 53,68%, dan 55,17% yang termasuk dalam skala interval > 50,00% dikategorikan rasio ketergantungan keuangan daerah Sangat Tinggi. Tahun 2018-2020 adalah 47,92%, 44,21%, dan 43,32% yang termasuk dalam skala interval 40,01%–50,00% dikategorikan rasio ketergantungan keuangan daerah Tinggi.

Rata-rata persentase Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2011 – 2020 dalam skala interval > 50,00% karena nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 57,576% dikategorikan Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Bogor masih sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

c) Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah (RTDDFKD)

Tabel 9. Hasil Olah Data RTDDFKD Kota Bogor T.A. 2011 - 2020

T.A.	PAD (Rp)	PD (Rp)	Persentase (%)	RTDDFKD
2011	230.449.644.620	1.141.638.163.971	20,18	Sedang
2012	300.932.470.210	1.375.300.603.178	21,88	Sedang
2013	464.695.880.000	1.574.372.010.000	29,51	Sedang
2014	544.996.250.000	1.757.857.930.000	31,00	Cukup
2015	617.062.227.085	1.827.008.273.928	33,77	Cukup
2016	711.730.823.933	2.135.473.505.109	33,32	Cukup
2017	728.666.344.804	2.081.123.963.826	35,01	Cukup
2018	875.230.630.511	2.261.049.903.659	38,70	Cukup
2019	944.394.650.807	2.350.478.728.324	40,17	Baik
2020	1.083.412.298.220	2.434.344.617.189	44,50	Baik
Rata - rata :			32,804	Cukup

Sumber : Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Berdasarkan hasil perhitungan seperti disajikan pada tabel 9, Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor dari rasio tingkat derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah Tahun Anggaran 2011 – 2013 adalah 20,18%, 21,88%, dan 29,51% yang termasuk dalam skala interval 20,01% - 30,00% dikategorikan kemampuan keuangan daerah Sedang. Tahun Anggaran 2014 – 2018 adalah dapat 31,00%, 33,77%, 33,32%, 35,01%, dan 38,70% yang termasuk dalam skala interval 30,01% - 40,00% kemampuan keuangan daerah dikategorikan Cukup. Tahun Anggaran 2019 – 2020 adalah 40,17% dan 44,50% yang termasuk dalam skala interval 40,01% - 50,00% kemampuan keuangan daerah dikategorikan Baik.

Rata-rata persentase Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Tahun 2011 – 2020 dalam skala interval 30,01% - 40,00% karena nilai yang didapat 32,804% dikategorikan Cukup.

Rasio tingkat derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat derajat desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Pemerintah Kota Bogor selama sepuluh tahun terakhir telah cukup mendapatkan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan.

d) *Rasio Efektivitas terhadap PAD (REPAD)*

Tabel 10. Hasil Olah Data REPAD Kota Bogor T.A. 2011 - 2020

T.A.	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2011	230.449.644.620	181.953.035.493	126,65	Sangat Efektif
2012	300.932.470.210	211.014.043.190	142,61	Sangat Efektif
2013	464.695.880.000	315.010.039.863	147,51	Sangat Efektif
2014	544.996.250.000	413.249.212.694	131,88	Sangat Efektif
2015	617.062.227.085	627.815.080.243	98,28	Efektif
2016	711.730.823.933	728.030.823.933	97,76	Efektif
2017	728.666.344.804	917.788.606.450	79,39	Kurang Efektif
2018	875.230.630.511	887.396.041.682	98,62	Efektif
2019	944.394.650.807	972.607.288.978	97,09	Efektif
2020	1.083.412.298.220	741.531.123.201	146,10	Sangat Efektif
Rata - rata :			116,589	Sangat Efektif

Sumber : Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana disajikan pada tabel 10 Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dari rasio efektifitas terhadap PAD Tahun Anggaran 2011 – 2014 adalah 126,65%, 142,61%, 147,51% dan 131,88% yang termasuk dalam skala interval di atas 100% dengan kriteria Sangat Efektif. Tahun 2015-2016 adalah 98,28%, dan 97,76% yang termasuk dalam skala interval 90%-100% dengan kriteria Efektif. Tahun 2017 adalah 79,39 % yang termasuk dalam skala interval 60%-80% dengan kriteria Kurang Efektif. Tahun Anggaran 2018-2019 adalah 98,62%, dan 97,09% yang termasuk dalam skala interval 90%-100% dengan kriteria Efektif. Tahun Anggaran 2020 adalah 146,1% yang termasuk dalam skala interval di atas 100% dengan kriteria Sangat Efektif.

Rata-rata Rasio Efektivitas terhadap terhadap PAD berada pada skala interval diatas 100% karena nilai yang diperoleh 116,589% dengan kriteria Sangat Efektif.

e) *Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)*

Tabel 11. Hasil Olah Data REKD Kota Bogor T.A. 2011 - 2020

T.A.	BD (Rp)	PD (Rp)	Persentase (%)	REKD
2011	1.074.576.515.295	1.141.638.163.971	94,12	Kurang Efisien
2012	1.111.776.515.295	1.375.300.603.178	80,83	Cukup Efisien
2013	1.421.277.450.000	1.574.372.010.000	90,27	Kurang Efisien
2014	1.702.110.250.000	1.757.857.930.000	96,82	Kurang Efisien
2015	2.038.547.529.029	1.827.008.273.928	111,57	Tidak Efisien
2016	2.512.412.570.542	2.135.473.505.109	117,65	Tidak Efisien
2017	2.391.239.963.826	2.081.123.963.826	114,90	Tidak Efisien
2018	2.530.748.633.994	2.261.049.903.659	111,92	Tidak Efisien
2019	2.607.679.400.305	2.350.478.728.324	110,94	Tidak Efisien
2020	2.604.493.955.763	2.434.344.617.189	106,98	Tidak Efisien
Rata - rata :			103,6	Tidak Efisien

Sumber : Hasil Olah Data APBD Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011-2020

Berdasarkan hasil perhitungan seperti disajikan pada tabel 11, Kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dari rasio efisiensi keuangan daerah tahun 2011 adalah 94,12% yang termasuk dalam skala interval 90%-100% dengan kriteria Kurang Efisien. Tahun 2012 adalah 80,83% yang termasuk dalam skala interval 80%-90% dengan kriteria Cukup Efisien. Tahun 2013-2014 adalah 90,27%, dan 96,82% yang termasuk dalam skala interval 90%-100% dengan kriteria Kurang Efisien. Tahun 2015-2020 adalah 111,57%, 117,65%, 114,90%, 111,92%, 110,94%. Dan 106,98% yang termasuk dalam skala interval 100% ke atas dengan kriteria Tidak Efisien.

Rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor tahun 2011 – 2020 pada skala interval 100% keatas karena nilai yang diperoleh sebesar 103,6% dengan kriteria Tidak Efisien. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara Pendaatan Daerah dengan Belanja Daerah.

Keterangan :

KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
T.A. = Tahun Anggaran
PD = Pendapatan Daerah
DP = Dana Perimbangan
PAD = Pendapatan Asli Daerah
BD = Belanja Daerah

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor T.A. 2011-2020

a) Hasil Uji Normalitas

Tabel 12. Uji Normalitas

			Unstandardized Residual
N			10
Normal Parameters ^{a,b}		Mean	.0000000
		Std. Deviation	2.45799047
Most Extreme Differences	Extreme	Absolute	.174
		Positive	.171
		Negative	-.174
Test Statistic			.174
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil uji normalitas membuktikan nilai *asymp.sig* pada uji *Kolmogorov-Smirnov* akan seluruh nilai residu data di atas tingkat signifikansi penelitian 5% yaitu sebesar 0,200 (20%). Hal ini memperlihatkan data digunakan berdistribusi normal.

b) Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 13. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD (X2)	1.000	1.000
2 (Constant)		
PAD (X2)	.815	1.227
DP (X3)	.815	1.227

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil uji multikolineritas membuktikan nilai *tolerance* untuk satu variabel dalam model regresi > 0,1 dan nilai VIF untuk satu variabel terhadap setiap model regresi < 10. Hasil uji ini memperlihatkan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c) Hasil Uji Autokorelasi

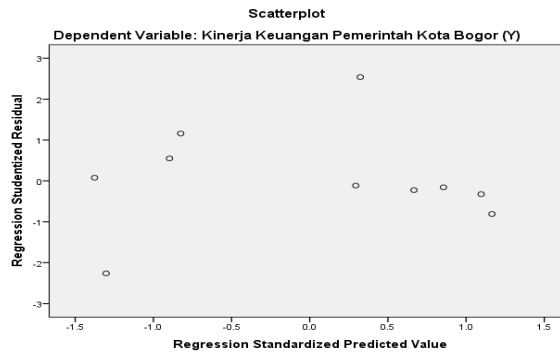
Tabel 14. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.968 ^a	.938	.930	6.71817	
2	.995 ^b	.991	.988	2.78710	1.062

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan pengujian autokorelasi nilai DW yaitu sebesar 1.062. Sehingga disimpulkan residual dari regresi bersifat independen atau tidak terjadi gejala autokorelasi, sebab nilai DW test yang dihasilkan pada rentang +/- 2.

d) Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Olah Data

Gambar 2. Grafik Scatterplot

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas dari Grafik Scatterplot tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

3. Uji Hipotesis: Pengaruh Variabel Independen (Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah) Secara Simultan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)

Berdasarkan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian estimasi hubungan antara keempat variabel independen (Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah) dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam persamaan regresi berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \varepsilon$$

Tabel 15. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.546	5.751		.964	.363
PAD (X2)	8.724E-11	.000	.968	10.989	.000
2 (Constant)	57.378	8.587		6.682	.000
PAD (X2)	9.710E-11	.000	1.078	26.616	.000
DP (X3)	-5.629E-11	.000	-.254	-6.283	.000

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel 15 di atas maka estimasi hubungan antar variabel penelitian dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = 57,378 + 9,710X_2 - 5,629X_3$$

Untuk melihat apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model sebagaimana yang digambarkan dalam persamaan di atas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen digunakan uji F. Berdasarkan Uji F bila nilai signifikan lebih kecil dari α toleransi 0,05 maka hipotesis H1 diterima yaitu kedua variabel independen PAD (X2) dan Dana Perimbangan (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

a) *Uji F Statistik*

Tabel 16. Uji F Statistik

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5450.256	1	5450.256	120.758	.000 ^b

Residual	361.070	8	45.134		
Total	5811.325	9			
2 Regression	5756.950	2	2878.475	370.559	.000 ^c
Residual	54.375	7	7.768		
Total	5811.325	9			

Sumber: Hasil Olah Data

Hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dapat disimpulkan variabel Pendapatan Asli Daerah (X₂), dan Dana Perimbangan (X₃) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Y).

b) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 17. Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.968 ^a	.938	.930	6.71817
2	.995 ^b	.991	.988	2.78710

Sumber: Hasil Olah Data

Dari hasil *output SPSS* tersebut nilai dari R² sebesar 0,991 berarti besar sumbangan pengaruh variabel independen yaitu 99,1%, sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi dapat disimpulkan penelitian yang dilakukan ini layak karena variabel independen yang digunakan memiliki nilai R² yang tinggi yaitu 99,1% mampu menjelaskan variabel dependen.

Dari hasil rekapitulasi analisis regresi linier berganda, uji F dan uji koefisien determinan, maka model hubungan antara ke dua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (X₂), dan Dana Perimbangan (X₃) dapat digambarkan melalui persamaan berikut :

$$Y = 57,378 + 9,710X_2 - 5,629X_3 + \epsilon, R^2 = 0,991$$

Koefisien regresi masing-masing variabel independen dapat dijelaskan :

1. Konstanta (α) = 57,378. Menunjukkan jika setiap variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sama dengan nol, maka nilai dari variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 57,378. Artinya, apabila tidak ada variabel lain yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah maka besarnya mencapai 57,378 %.
2. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 9,710 menunjukkan bahwa hubungan variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah positif, artinya bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah 1 rupiah menyebabkan kenaikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebesar 9,710%.
3. Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan sebesar -5,629 menunjukkan bahwa hubungan variabel Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah negatif, artinya bahwa kenaikan Dana Perimbangan 1 rupiah menyebabkan penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebesar 5,629%

c) Hasil Uji Hipotesis:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₂) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil pengujian membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil t sebesar 26,616, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada dibawah 0,05 ($0,000 < 0,05$).

2. Pengaruh Dana Perimbangan (X₃) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil pengujian membuktikan bahwa Dana Perimbangan menunjukkan hasil t sebesar -6,283, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun 2011-2020. Nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$).

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X2) dan Dana Perimbangan (X3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Hasil pengujian statistik secara simultan dapat diketahui bahwa nilai F dengan signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) yang berarti secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikansi terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor T.A. 2011-2020.

1. **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor ditinjau dari segi rasio**

- a) *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)*

Rata-rata persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2011-2020 adalah 61,853% yang termasuk dalam skala interval 50% - 75% dengan kategori kemampuan keuangan daerah Sedang, dan pola hubungan rata-rata Partisipatif yaitu peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bogor tahun 2011 – 2020 dalam kategori kemampuan daerah Sedang. Tahun 2011 – 2019 PAD masih jauh dibawah Dana Perimbangan, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Penerimaan PAD tahun 2020 melebihi Dana Perimbangan, diduga akibat dari Pandemi Covid 19 yang berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian global, sehingga untuk Realisasi Dana Perimbangan di tahun 2020 terjadi pengurangan anggaran APBN di sektor pos penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak untuk tahun 2019 sebesar Rp 96,95 miliar menjadi sebesar Rp 81,40 miliar di tahun 2020 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 15,55 miliar atau sebesar 16,04%. Juga terjadi pengurangan anggaran di sektor pos Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2019 sebesar Rp 128,63 miliar menjadi sebesar Rp 122,39 miliar di tahun 2020 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 6,24 miliar atau sebesar 4,85%.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Bogor masih sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru, baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya menggairahkan kembali Pariwisata Kota Bogor yang selama ini stagnan, berdasarkan kearifan lokal pendirian Koperasi, unit Keuangan pedesaan/kelurahan berbasis UMKM, dan pendirian BUMD sektor potensial.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010) berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi NTB selama periode tahun anggaran 2003 - 2007 rata-rata tingkat kemandirian adalah 54,58% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan Provinsi dengan tingkat kemandirian keuangan daerah Sedang. Dalam skala interval 50% - 75% tergolong pola hubungan Partisipatif. Menurut I Dewa Gde Bisma penyebab terjadinya hal tersebut hampir sama dengan apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini yaitu Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi NTB masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan belum mampu untuk mengelola potensi penerimaan di daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi NTB selama periode Tahun Anggaran 2003 - 2007 memiliki kemandirian keuangan yang sedang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah Kota Bogor

maupun Pemerintah Provinsi NTB diharapkan selalu memaksimalkan potensi PAD yang ada, sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari Pusat saja.

b) *Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (RTKKD)*

Rata-rata persentase Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (RTKKD) Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2011-2020 sebesar 57,576% yang termasuk dalam skala interval > 50,00% dikategorikan rasio ketergantungan keuangan daerah Sangat Tinggi.

Rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Semakin tinggi ketergantungan suatu daerah, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan PAD melalui sektor pajak dan retribusi. Meningkatkan target PAD berdasarkan analisis potensi riil daerah dan didiskusikan pada tahap perencanaan, tidak hanya dengan menaikkan target, meningkatkan perolehan PAD terutama dengan mengoptimalkan pencapaian pada komponen pajak dan retribusi.

Peningkatan PAD baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi dilakukan melalui kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan cara memperbaiki kinerja pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicapai. Perlu mengurangi ketergantungan kepada Pemerintah Pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat untuk meningkatkan PAD. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah ataupun jenis penerimaan daerah lainnya, agar dapat meningkatkan sumber-sumber PAD dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Namun juga melibatkan peningkatan kualitas SDM, penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung, peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi dan netralitas, revitalisasi lembaga-lembaga terkait termasuk desentralisasi kewenangan perijinan investasi, kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik dan optimalisasi potensi perekonomian berdasarkan kearifan lokal sehingga bermanfaat kepada daerah.

Sejalan penelitian yang telah dilakukan I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010) tingkat ketergantungan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan rasio antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi NTB terhadap Pemerintah Pusat adalah 77,93%. Apabila diklasifikasikan menurut kriteria tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dengan tingkat ketergantungan keuangan daerah Sangat Tinggi. Hal ini sama dengan hasil penelitian ini, dimana rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2011-2020 dalam interval > 50,00 karena nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 57,576% dikategorikan rasio ketergantungan keuangan daerah Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Bogor masih sangat tinggi terhadap Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi melalui Dana Perimbangan.

c) *Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah (RTDDFKD)*

Rata-rata persentase Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah (RTDDFKD) Pemerintah Kota Bogor tahun 2011-2020 adalah 32,804% yang termasuk dalam skala interval 30,01% - 40,00% kemampuan keuangan daerah dikategorikan Cukup. Rasio tingkat derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan pembangunan.

Pemerintah Kota Bogor selama sepuluh tahun terakhir telah cukup mendapatkan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan Pemerintah Pusat untuk melakukan pembangunan. Tingkat derajat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Pemerintah Kota Bogor di dalam mengelola PAD sudah cukup memiliki kemampuan, namun masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga menyebabkan memiliki andil yang besar dalam membiayai pembangunan daerah di Pemerintah Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Untuk itu ke depannya Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat berupaya meningkatkan PAD nya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto (2010) Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007 berdasarkan rasio tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi NTB selama periode tahun anggaran 2003 – 2007 diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total Penerimaan Daerah dapat diketahui bahwa Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi mengalami peningkatan yang cukup pada saat mulai diterapkannya sistem penganggaran (APBD), dengan pendekatan berbasis kinerja. Namun penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja tidak terlalu menunjukkan dampak terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah Provinsi NTB melalui optimalisasi perolehan PAD. Masih besarnya tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi NTB kepada Pemerintah Pusat terutama ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pembangunan daerah, peran PAD atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan sendiri masih kurang dari 50 %, sisanya sebesar 60 % lebih masih menggantungkan pembiayaan dari bagian Dana Alokasi Umum (DAU). Trend realisasi PAD yang kurang stabil turut mempengaruhi besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Kecenderungan ini disebabkan masih rendahnya kinerja pemungutan pajak daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat dalam kerangka desentralisasi fiskal. Berdasarkan hasil analisis terhadap rata-rata tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi NTB periode tahun anggaran 2003 – 2007 adalah 32,61% sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat Derajat desentralisasi Fiskal adalah Provinsi dengan tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Cukup. Pemerintah Provinsi NTB memiliki kriteria penilaian yang sama dengan Pemerintah Kota Bogor, meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan perbandingan karena perbedaannya tahun penelitiannya.

Rata-rata persentase Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bogor selama tahun 2011 sampai dengan 2020 sebesar 32,804% dalam skala interval 30,01% – 40,00% dengan kategori Cukup. Rasio tingkat derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bogor untuk melaksanakan pembangunan dengan kategori Cukup. Bahwa adanya desentralisasi fiskal akan dapat menciptakan kemandirian daerah dan dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah harus melakukan tindakan-tindakan secara komprehensif dalam upaya meningkatkan PAD dengan melakukan diversifikasi sumber-sumber PAD sehingga tidak lagi tergantung kepada sumber pendapatan yang berasal dari potensi pajak dan retribusi daerah saja. Upaya pengembangan pariwisata beserta sektor-sektor pendukungnya harus dilakukan secara masif dan bersinergi dengan stakeholder-stakeholder terkait.

Pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan rasio kemandirian yang akan berdampak terhadap penurunan rasio ketergantungan, langkah lainnya adalah dengan meningkatkan rasio tingkat derajat desentralisasi fiskal. Pemerintah Daerah sebaiknya tidak hanya bersandar pada potensi pajak dan retribusi daerah saja, namun harus mampu menggali pendapatan dari sektor investasi daerah dan perusahaan milik daerah. Hal ini perlu dilakukan mengingat potensi pajak dan retribusi daerah sampai saat ini belum mampu membiayai Belanja Daerah

sehingga dengan menggali pendapatan lain diluar pajak dan retribusi mampu mendorong kemandirian daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal sampai saat ini belum mampu mendorong kemampuan daerah khususnya PAD dalam membangun kemandirian daerah, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi kebijakan desentralisasi fiskal dan merumuskan kembali terkait kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong daerah dalam membangun kemandirian daerahnya.

d) *Rasio Efektivitas terhadap PAD (REPAD)*

Rata-rata Rasio Efektivitas terhadap PAD (REPAD) adalah 116,589% yang termasuk dalam skala interval diatas 100% dengan kriteria Sangat Efektif.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada rasio efektivitas terhadap PAD, efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor Sangat Efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan/ditargetkan sebelumnya. Pemerintah Kota Bogor juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan kecuali pada tahun 2017, namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya menggairahkan kembali pariwisata Kota Bogor yang selama ini stagnan, berdasarkan kearifan lokal pendirian koperasi, unit keuangan pedesaan/kelurahan berbasis UMKM, dan pendirian BUMD sektor potensial.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dori Saputra (2014) yang melakukan penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dijelaskan bahwa kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, secara rata-rata dari tahun 2004 – 2011 berada pada kecenderungan sebesar 109,8% yang menandakan pada kategori Sangat Efektif. Dalam penelitian ini di Pemerintah Kota Bogor, kinerja pengelolaan keuangannya juga sudah sangat efektif, kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Akan tetapi masing-masing daerah diharapkan untuk tidak selalu terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi PAD di daerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya.

e) *Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)*

Rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) Pemerintah Kota Bogor tahun 2011-2020 adalah 103,6% yang termasuk dalam skala interval 100% ke atas dengan kriteria Tidak Efisien. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.

Rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor yang tergolong Tidak Efisien diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini masih inefisiensi karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kota Bogor dapat meminimalisir jumlah belanja daerahnya dengan disesuaikan pendapatan daerahnya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi Belanja Daerah.

Sejalan penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko (2013) di Kabupaten Blora, rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah pada skala interval 90% – 100% karena nilai rasionya 99,61% dengan kriteria Kurang Efisien. Hal tersebut sama dengan hasil penelitian ini, dimana efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor juga Tidak Efisien. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor artinya kenaikan PAD akan menyebabkan kenaikan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor, artinya kenaikan dana perimbangan akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor. Model yang berbentuk dari hasil regresi model statis adalah sebagai berikut : $Y = 57,378 + 9,710X_2 - 5,629X_3$

Kesimpulan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Julitawati (2012) bahwa variabel PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya hasil pengujian masing-masing variabel akan dijelaskan pada bagian ini.

a) Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Hasil pengujian membuktikan bahwa PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor karena pada dasarnya PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang dilakukan pemerintah Kota Bogor dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga sudah seharusnya Pemerintah Daerah harus meningkatkan PAD daerahnya masing-masing guna peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. PAD merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, mengingat PAD sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata, dan bertanggungjawab, serta dapat berperan penting dalam rencana peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi. Semakin tinggi jumlah PAD suatu daerah, semakin kecil kemungkinan Pemerintah Kota Bogor mengalami kesulitan keuangan dalam pendanaan infrastruktur bagi pembangunan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Julitawati (2012) dan Junarwati (2013) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor.

b) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Hasil pengujian membuktikan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Julitawati (2012) yang menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan dari pada otonomi daerah adalah agar Pemerintahan Daerah mandiri secara fiskal dan tidak berketergantungan kepada Pemerintahan Pusat. Oleh karena Pemerintah Pusat telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menggali potensi sumberdaya dengan maksud agar PAD Pemerintahan Daerah bias meningkat dan tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat bisa berkurang. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak, serta DAU dan DAK merupakan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan Belanja Daerah. Untuk menutup kekurangan belanja daerah Pemerintah Pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat akan memperlihatkan semakin kuat Pemerintah Daerah bergantung kepada Pemerintah Pusat yang menunjukkan Kinerja Keuangan Pemerinah Daerah menurun dan begitu juga sebaliknya semakin kecil Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah semakin tinggi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

c) Pengaruh PAD dan DP terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Hasil pengujian statistik secara simultan dapat diketahui bahwa nilai Fsig 0.000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pada persamaan regresi dengan variabel PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor pada taraf signifikan α 5%. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Julitawati (2012) yang membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil ini memberikan indikasi kuat bahwa penelitian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan akan sangat berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penurunan PAD akan menghambat pelaksanaan kegiatan Pemerintah. Begitu juga sebaliknya, peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD sehingga pelaksanaan kegiatan Pemerintah tidak terhambat (Hamara, 2010). Sedangkan Julitawati (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa penelitian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor T.A. 2011-2020 berdasarkan rasio: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah nilai rata-rata dengan kriteria Sedang, dan pola hubungan rata-rata Partisipatif. (2) Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah nilai rata-rata dengan kriteria Sangat Tinggi. (3) Rasio Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah dengan kategori Cukup. (4) Rasio Efektivitas terhadap PAD nilai rata-rata dengan kriteria Sangat Efektif. (5) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah nilai rata-rata dengan kategori Tidak Efisien.

Variabel PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Variabel PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Litbang Depdagri RI dan Fisipol – UGM.1991. *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta
- Halim, Abdul., (2001), *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta..
- _____. (2007). *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Jakarta.
- Mahsun, Mohamad. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta.

Dokumen Resmi

- Departemen Dalam Negeri. (1996). *Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996*
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah _____ . Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Jurnal

- Adhiantoko, Hony. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2002–2011)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bisma, I Dewa Gde. dan Hery Susanto. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*, *Jurnal. Ganec Swara Edisi Khusus*, Vol.4, No.3, Desember 2010.
- Hamara, Krisna Dwipayana. (2014). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tasikmalaya*. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi. Universitas Siliwangi.
- Junarwati. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada kab/kota di Provinsi Aceh Tahun 2010–2012*. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 2 Juli 2013 Hlm.186 – 193*.
- Saputra, Dori. (2014). *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daeah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat*. *Artikel Ilmiah*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang

Tesis

Julitawati, Ebit., Darwanis, dan Jalaludin, (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli (PAD) Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Tesis. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.